



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI SUHESTI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 1000687

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.155.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 675.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI , Rp. 680.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 221.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5LS A/T / MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA L1K026.33L1 A/T / SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T /SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
4. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T/ SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, HONDA C100/ SOLO Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 535.390.500**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 228.869.195**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.140.259.695

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.140.259.695

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.